

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, isu-isu perubahan iklim dan pemanasan global menjadi hal yang umum dibicarakan. Pemanasan global ada peningkatan suhu permukaan bumi dipicu naiknya kadar Gas Rumah kaca (GRK) di atmosfer (Pratama, 2019). Dilansir dari rilis pers resmi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Kyoto Jepang, ada 6 jenis GRK, yakni karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, belerang heksafluorida, hidrofluorokarbon, serta perfluorokarbon. Keenam gas ini memiliki kemampuan untuk memerangkap panas dari matahari sehingga menciptakan efek rumah kaca menghangatkan permukaan bumi. Efek rumah kaca tetap diperlukan bumi guna menjaga agar suhu saat siang dan malam hari stabil dan tidak berselisih terlalu besar. Namun, jika kadar kandungan GRK berlebihan akan membawa dampak yang merugikan terhadap bumi misalnya mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, terganggunya ekosistem, hingga terjadinya perubahan iklim yang ekstrem (Pusat Layanan Iklim Terapan BMKG, 2021).

Sumber dari 6 jenis GRK dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Seperti gas metana dari proses respirasi manusia dan binatang, gas dinitrogen oksida dari penggunaan pestisida, karbon dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri, dan lain sebagainya. Kegiatan industri menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi GRK yang berasal dari aktivitas manusia. Dalam hal ini, perusahaan berperan besar sebagai pelaku utama dalam sektor industri dan ekonomi dalam menghasilkan emisi GRK (Prafitri & Zulaikha, 2016).

Setiap perusahaan perlu mempertimbangkan efek lingkungan dari aktivitas operasional yang di lakukan, khususnya emisi GRK yang dihasilkan (Kalu et al., 2016). Salah satu caranya adalah dengan menghitung banyaknya emisi karbon yang dihasilkan selama perusahaan melakukan kegiatan operasional dari aktivitas industri dan mengungkapkan hasilnya. Pengungkapan emisi karbon

juga sebagai pertanggung-jawaban perusahaan serta penjelasan ke masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan perusahaan terhadap perubahan iklim (Yendrawati & Asy'ari, 2017).

Pemerintah Indonesia juga turut berkontribusi dalam upaya mitigasi pemanasan global melalui penerbitan regulasi dan peraturan mengenai gas rumah kaca sebagai komitmen nasional dalam menurunkan emisi serta mendukung peningkatan *sustainable development* di masa depan (Faisal et al., 2018).

Di tahun 2019 Indonesia tercatat berada di posisi kedelapan sebagai negara penghasil emisi gas karbon tertinggi di dunia serta keempat di Asia dibawah China, India, dan Jepang, sekaligus menjadi yang tertinggi di ASEAN. Indonesia berkontribusi sebesar 1,88% dari total emisi global pada tahun 2019 (Ge & Friedrich, 2020).

Tabel 1.1 Tabel Posisi Emisi Gas di Asia Tenggara

No	Negara	Total Emisi GRK
1	Indonesia	886 MtCO ₂ e
2	Thailand	397,3 MtCO ₂ e
3	Vietnam	335,1 MtCO ₂ e
4	Malaysia	291,2 MtCO ₂ e
5	Filipina	209,1 MtCO ₂ e
6	Myanmar	109 MtCO ₂ e
7	Singapura	63,1 MtCO ₂ e
8	Kamboja	35,3 MtCO ₂ e
9	Brunei Darussalam	16,3 MtCO ₂ e
10	Laos	11,5 MtCO ₂ e

Sumber: (Ge & Friedrich, 2020)

Setiap tahun, melalui Kementerian KLHK, pemerintah menjalankan program peneringkatan kinerja dan upaya perusahaan dalam pengelolaan lingkungan bernama *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* (PROPER). PROPER adalah kebijakan pemerintah guna menaikkan

pengelolaan lingkungan perusahaan, menurut peraturan perundang-undangan. Perusahaan bisa masuk ke satu dari lima citra PROPER: emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Perusahaan dengan PROPER emas diberikan apabila mereka sudah mengelola lingkungan lebih baik sesuai aturan KLHK serta menjalankan beragam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Perusahaan dengan PROPER hijau ke perusahaan mengelola lingkungan lebih baik dari syarat KLHK, dan punya keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, *Reduce-Reuse-Recycle* (3R) limbah padat, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 3R, disimpan untuk mengurangi pencemaran air, mengurangi emisi, serta meningkatkan efisiensi energi. Untuk perusahaan yang sudah mengelola lingkungan memenuhi persyaratan KLHK, PROPER biru diberikan. Peringkat tengah ini memberikan gambaran minimal yang wajib dicapai perusahaan pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pelaksanaan AMDAL. PROPER merah diberikan kepada perusahaan yang berupaya mengelola lingkungan, tetapi sebagian berhasil memenuhi syarat KLHK. PROPER hitam diberi ke perusahaan yang belum mengelola lingkungan sesuai dengan persyaratan KLHK, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kemungkinan izin usaha mereka dicabut (LindungiHutan, 2022).

Pada tahun 2020, 2.038 perusahaan mengikuti PROPER dengan 233 perusahaan diantaranya mendapat citra merah (Mohar Syarif, 2020). Di tahun 2021, terdapat 2.593 perusahaan peserta PROPER dengan 645 perusahaan yang mendapat citra merah (Pers, 2021). Ini artinya presentase perusahaan yang belum berhasil mencapai persyaratan KLHK meningkat 13% dalam satu tahun.

Meskipun pemerintah sudah mengatur tentang pengungkapan emisi karbon lewat peraturan di atas, karena pengungkapan emisi karbon di Indonesia sukarela, perusahaan punya kesempatan untuk lebih leluasa dalam menentukan informasi apa yang diungkap, serta menilai sendiri informasi yang relevan untuk diungkapkan di proses tersebut (Astari et al., 2020). Hal ini karena pengungkapan emisi karbon punya resiko perusahaan, seperti penurunan nilai pasar perusahaan, dan peningkatan biaya operasional (Aggarwal & Dow, 2012).

Prior et al., (2008) mengatakan manajer terlibat di praktik manajemen laba cenderung memanfaatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, atau penelitian ini yakni pengungkapan emisi karbon, sebagai sarana untuk mendapat kepercayaan dan dukungan stakeholder. Dengan begitu, manajer terbantu dalam upaya nya mempertahankan posisi dalam perusahaan. Menanggapi isu ini, dibutuhkan *corporate governance* yang baik dan efektif mengontrol dan mengawasi kinerja manajemen serta mengatur kebijakan-kebijakan terkait pengungkapan emisi karbon di laporan perusahaan.

Disisi lain, pelaporan emisi karbon juga dipengaruhi banyak hal, salah satu lainnya adalah belanja modal. Belanja modal terikat kuat dengan aktivitas operasional perusahaan karena setiap modal yang dibelanjakan, berarti ada faktor baru yang masuk dalam kegiatan operasional. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan jejak karbon di lingkungan (Karim et al., 2021). Belanja modal adalah bagian dari manajemen perusahaan yang dapat diatur dan dijaga oleh *corporate governance* yang baik. Dengan manajemen perusahaan baik, perusahaan dan investor dapat memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan tidak mengalami kerugian. Bahkan perusahaan besar pun dapat mengalami kesulitan keuangan jika tidak ada manajemen yang baik, sehingga investor pun harus lebih hati-hati menginvestasikan dana nya (Dianova & Nahumury, 2019).

Dari latar belakang, penulis ingin mengadakan penelitian berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan Belanja Modal Pada Pengungkapan Emisi Karbon dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi”. Populasi penelitian ini yakni perusahaan peserta *Public Disclosure Program for Enviromental Compliance* (PROPER) dan terdaftar di BEI. PROPER dipilih karena program ini adalah upaya pemerintah menjalankan prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah manajemen laba memberi pengaruh pada pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah belanja modal memberi pengaruh pada pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah *corporate governance* memediasi hubungan manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah *corporate governance* memediasi hubungan antara belanja modal pada pengungkapan emisi karbon?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni:

1. Menganalisa pengaruh manajemen laba pada pengungkapan emisi karbon perusahaan.
2. Menganalisa pengaruh belanja modal pada pengungkapan emisi karbon perusahaan.
3. Menganalisa mediasi *corporate governance* pada hubungan manajemen laba pada pengungkapan emisi karbon perusahaan.
4. Menganalisis mediasi *corporate governance* pada hubungan belanja modal dengan pengungkapan emisi karbon perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba dan Belanja Modal Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi” ini yakni:

1. Perusahaan
Penelitian ini harapannya memudahkan perusahaan mengambil keputusan tepat terkait emisi karbon yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup banyak orang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini berupa *insight* untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait emisi karbon di masa yang akan datang.

3. Peneliti

Peneliti bisa mendapat ilmu dan wawasan yang lebih dalam terkait pengungkapan emisi karbon yang merupakan hal yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia, bahkan dunia.